



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong telah selesai menyusun Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2025, yang memuat tentang evaluasi pelaksanaan Renja tahun berjalan sampai dengan triwulan satu dan Capaian Renstra, tujuan, sasaran, program dan kegiatan serta indikatif pembiayaan tahun anggaran 2025

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan ini adalah bagian dari proses perencanaan kerja pertahun terhadap program kegiatan sub kegiatan indikator target maupun pagu anggaran dikarenakan adanya pergeseran maupun perubahan didalam implementasi pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Akhirnya dengan disusunnya Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong Tahun 2025 ini, maka langkah-langkah yang diambil dalam mewujudkan sasaran dan tujuan pembangunan di Kabupaten Tabalong dapat tercapai, terlaksana dan berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan

Tanjung, Agustus 2025



Kepala Dinas Perhubungan

Kabupaten Tabalong,

TUMBUKAP JULIAN MANALU, S.STP, MT

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19780508 199612 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1. Latar Belakang	4
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II EVALUASI RENJA DINAS PERHUBUNGAN S/D TRIWULAN II TAHUN 2025	8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I	8
2.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong	17
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	19
BAB IV PENUTUP	32

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong merupakan acuan dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) Tahun 2025, rencana kerja anggaran perubahan perangkat daerah yang apabila telah melalui proses pembahasan dan persetujuan oleh tim eksekutif dan legislatif selanjutnya diproses untuk menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Perangkat Daerah (DPAP-PD) sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan APBDP pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025.

Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Tabalong memiliki tugas untuk membantu Kepala Daerah dengan tugas dan fungsi menjalankan sebagian urusan pemerintahan di sektor Transportasi dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 - 2029 yaitu : ***“Menuju Tabalong SMaRT (Sejahtera, Mandiri, Religius, dan Terdepan).***

Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong dalam tataran kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum akan mengimplentasikan nilai-nilai yang terkandung pada misi pertama yakni ***“Mendorong Kemajuan Daerah”***, namun dalam tataran kebijakan teknis akan sinergis dengan menetapkan beberapa program strategis yang berfokus dan berkaitan langsung dengan ke tiga yaitu :

- **Mendorong Kemajuan Daerah**

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong Tahun 2025 berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 2 Tahun Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang undang;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
 10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan , Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Pencanan Kerja Pemerintah Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 02);

17. Keputusan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah kabupaten Tabalong;
18. Surat Edaran Bupati Tabalong Nomor : B-77/BAPERRIDA/000.7/III/2025 tanggal 03 Maret 2025 perihal Penyusunan Perubahan RKPD dan Renja SKPD Tahun 2025

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong Tahun 2025 adalah untuk mengetahui :

1. Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong Tahun 2025 yang mengalami pergeseran / perubahan
2. Lokasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong Tahun 2025 yang mengalami pergeseran / perubahan
3. Indikator dan Target Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong yang mengalami pergeseran / perubahan
4. Kelompok Sasaran Kegiatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong Tahun 2025 yang mengalami pergeseran / perubahan
5. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan Perubahan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong Tahun 2025 yang mengalami pergeseran / perubahan

Adapun tujuan penyusunannya adalah menjabarkan rencana program dan kegiatan serta menetapkan target-target kinerja dan pendanaan indikatif sebagai bentuk komitmen organisasi bagi pencapaian kinerja yang optimal, serta sebagai arah kebijakan dan acuan dalam :

1. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Perubahan (RKAP-PD), Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Perangkat Daerah (DPAP-PD) dan Rencana Perjanjian Kinerja Perubahan;
2. Penilaian Kinerja Tahunan Dinas Perhubungan / Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
3. Memastikan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada tahun anggaran 2025
4. Menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergitas antara Sekretariat, Bidang-Bidang dan UPTD serta antar instansi terkait;

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan , Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Tentang Rencanan

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Perencanaan Kerja Pemerintah Daerah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

BAB II Evaluasi Renja Dinas Perhubungan s/d Triwulan I Tahun 2025

BAB III Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Perhubungan

BAB IV Penutup

LAMPIRAN

BAB II

EVALUASI RENJA DINAS PERHUBUNGAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II

Evaluasi Pelaksanaan Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 sampai dengan triwulan 2 (Dua) posisi bulan Juni Tahun 2025, disajikan dalam tabel berikut :

*Tabel 2.1.1.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Tabalong*

Belanja	Anggaran (Rp)		
	Anggaran 2025	Realisasi sd Juni 2025	% Capaian
Pendapatan Daerah	1.790.000.000	869.828.618	50,10
Belanja Daerah	55.771.665.578	8.627.595.315	15,47
- Belanja operasi	30.526.920.651,20	8.378.723.222	27,45
- Belanja Pegawai	9.200.918.000	3.775.862.297	41,04
- Belanja Barang dan Jasa	21.326.002.651	4.602.860.925	21,58
- Belanja Modal (BM) :	25.244.744.926,80	248.872.093	0,99
- BM Peralatan dan mesin	13.692.188.351	108.435.900	0,79
- BM Gedung dan bangunan	9.292.549.359,80	140.436.193	1,51
- BM Jalan,Jaringan,dan Irigasi	2.260.007.216	0	0

Sedangkan realisasi pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan Renja Tahun 2025 sampai dengan bulan Juni 2025 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.1.2.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong s/d Juni 2025 dan
Pencapaian Renstra Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025

PD : Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sub kegiatan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan dan sub Kegiatan 2025			Target Program dan Kegiatan sub kegiatan renstra 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
				Target Renja PD tahun 2025	Realisasi Renja PD tahun 2025 s/d Juni 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Nilai Kepuasan terhadap pelayanan kesekretariatan (%)	100%	BB	BB			BB		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	8 dokumen	8 dokumen	2 dokumen	37,5	100%	2 dokumen	37,5
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	21 Laporan	21 Laporan	21 Laporan	5 Laporan	-	21 Laporan	5 Laporan	
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	3 Data	3 Data	3 Data	-	-	3 Data		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah yang tertib, transparan, dan akuntabel	100%	100%	100%			100%		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/Bul	14 Orang/Bulan	14 Orang/Bul	7 Orang/Bul		14 Orang/Bulan		

	(Orang/bulan)	an		an	an				
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian secara tertib, mutakhir dan terdokumentasi	100%	100%				100%		
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1 Paket	1 Paket	1 Paket			1 Paket		
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	200 Orang	15 Orang	15 Orang			200 Orang		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhi Administrasi Umum perkantoran yang tertib dan efisien	100%	100%				100%		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	22 Paket	22 Paket	22 Paket			22 Paket		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	91 Paket	91 Paket	91 Paket			91 Paket		
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	14 Paket	14 Paket	14 Paket			14 Paket		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	170 Laporan	170 Laporan	170 Laporan			170 Laporan		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Penunjang Kegiatan yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	14 Laporan	25 Laporan	25 Laporan			14 Laporan		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan			1 Laporan		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1 Laporan	12 Laporan	12 Laporan			1 Laporan		
Penyediaan Jasa Pelayanan	Jumlah Laporan Penyediaan	12	12 Laporan	12			12 Laporan		

Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Laporan		Laporan					
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang di pelihara oleh perangkat daerah	155 Unit	155 Unit	155 Unit			155 Unit		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	34 Unit	34 Unit	34 Unit			34 Unit		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	120 Unit	120 Unit	120 Unit			120 Unit		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1 Unit	1 Unit	1 Unit			1 Unit		
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Konektivitas Darat (%)								
	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal (%)								
	Persentase layanan jasa sarana dan prasaranan fasilitas keselamatan perhubunganl (%)								
Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah	3 Dokumen					3 Dokumen		
Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota (Dokumen)	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen			3 Dokumen		
Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota (Dokumen)	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen			1 Dokumen		
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah unit perlengkapan jalan yang terpasang pada ruas jalan kabupaten/kota</i>	350 Unit	807 Unit	807 Unit			350 Unit		
Penyediaan Perlengkapan	Jumlah Perlengkapan Jalan di	350 Unit	350 Unit	350 Unit			350 Unit		

Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)								
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit)	457 Unit	457 Unit	457 Unit			457 Unit		
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang beroperasi sesuai standar pelayanan	3 Unit	3 Unit	3 Unit			3 Unit		
Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun (Dokumen)		0	0					
Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang) (Unit)	1 Unit	0	1 Unit			1 Unit		
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara (Unit)	2 Unit	0	2 Unit			2 Unit		
Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir yang diterbitkan	1 Dokumen					1 Dokumen		
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen			1 Dokumen		
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	36 Laporan	36 Laporan	36 Laporan			36 Laporan		
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan bermotor yang diuji secara berkala	4600 KBWU					4600 KBWU		
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan	13 Unit	13 Unit	13 Unit			13 Unit		

Kendaraan Bermotor	Bermotor yang Tersedia (Unit)								
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara (Unit)	13 Unit	13 Unit	13 Unit			13 Unit		
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi/ruas jalan yang dilaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas								
Pembangunan Rute Aman Sekolah (RASS)	Jumlah kawasan pembangunan Rute Aman Sekolah yang terbangun (Unit)	4 Unit	4 Unit	4 Unit			4 Unit		
Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS) (Unit)	4 Unit	7 Unit	4 Unit			4 Unit		
Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Dokumen)	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen			3 Dokumen		
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan			3 Laporan		
Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan (Dokumen)	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen			3 Dokumen		
Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah persetujuan hasil Andalalin yang diterbitkan								
Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin (Laporan)	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan			1 Laporan		
Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin	Jumlah penilai Andalalin yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi (Orang)	2 Orang	1 Orang	2 Orang			2 Orang		
Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi (Laporan)	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan			1 Laporan		
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah laporan hasil audit dan inspeksi keselamatan LLAJ	9 Laporan							

Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal (Laporan)	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan			3 Laporan		
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota (Laporan)	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan			3 Laporan		
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (Laporan)	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan			3 Laporan		
Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Jumlah Auditor dan Inspektur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	1 Orang	1 Orang	1 Orang			1 Orang		
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah armada angkutan umum yang beroperasi di trayek kabupaten/kota								
Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan			4 Laporan		
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)	57 Unit	55 Unit	57 Unit			57 Unit		
Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan lintas kabupaten/kota								
Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen			1 Dokumen		

	Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)								
Penerbitan izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah izin penyelenggaraan angkutan taksi dalam wilayah kabupaten/kota yang diterbitkan								
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan			12 Laporan		
UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor									
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)									
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor	13 Unit					13 Unit		
UPTD Bandara Udara Warukin									
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Kepuasan terhadap pelayanan kesekretariatan (%)								
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian secara tertib, mutakhir dan terdokumentasi								
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1 Paket	-	1 Paket			1 Paket		
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	22 Orang	-	22 Orang			22 Orang		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhi Administrasi Umum perkantoran yang tertib dan								

	efisien								
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1 Paket	-	1 Paket			1 Paket		
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1 Paket		1 Paket			1 Paket		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	10 laporan	-	10 Laporan			10 laporan		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Penunjang Kegiatan yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah								
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2 Laporan	-	2 Laporan			2 Laporan		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	10 Laporan	-	10 Laporan			10 Laporan		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang di pelihara oleh perangkat daerah								
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3 Unit	-	3 Unit			3 Unit		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	6 Unit	-	6 Unit			6 Unit		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1 unit	-	1 Unit			1 unit		

2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan

*Tabel 2.2.1
Isu Strategis Kementerian Perhubungan
dan Dinas Perhubungan Provinsi Kalsel*

Isu Strategis Kementerian Perhubungan	Isu Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan
- Peningkatan konektivitas antar wilayah dan antar moda transportasi secara nasional	- Terbatasnya ketersediaan dan pelayanan angkutan umum antar kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan
- Pengembangan transportasi publik yang efisien, inklusif, dan ramah lingkungan	- Masih rendahnya aksesibilitas dan mobilitas menuju kawasan pelabuhan dan simpul transportasi
- Peningkatan keselamatan transportasi dan pengawasan terhadap kendaraan bermuatan berlebih (ODOL)	- Rendahnya kualitas dan keselamatan lalu lintas jalan
- Transformasi digital dan modernisasi pelayanan transportasi	- Kurangnya integrasi antar moda dan keterpaduan sarana prasarana transportasi
- Reformasi tata kelola dan peningkatan kualitas pelayanan publik sektor transportas	- Perlunya transportasi yang ramah lingkungan dan efisien energi
- Pengembangan transportasi berkelanjutan dan rendah emisi karbon	- Masih terbatasnya kapasitas SDM dan kelembagaan sektor transportasi
- Peningkatan integrasi sistem logistik nasional dan transportasi daerah	Keterbatasan data dan sistem informasi transportasi daerah

*Tabel 2.2.2.
Isu Strategis RPD Kabupaten Tabalong dan Dinas Perhubungan
Kabupaten Tabalong dalam renstra 2025 - 2026*

Isu Strategis RPD Kabupaten Tabalong	Isu Strategis Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong
- Kesenjangan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah masih tinggi	- Konektivitas transportasi antar kecamatan dan antar moda belum optimal
- Pemerataan pelayanan dasar dan sarana publik belum sepenuhnya tercapai	- Layanan angkutan umum dan fasilitas keselamatan transportasi belum menjangkau seluruh wilayah
- Daya saing daerah perlu ditingkatkan melalui infrastruktur penunjang ekonomi	- Kondisi sarana dan prasarana transportasi belum sepenuhnya mendukung kegiatan ekonomi dan logistik daerah
- Kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik perlu diperkuat	- Sistem layanan perhubungan belum sepenuhnya terintegrasi secara digital dan efisien
- Peningkatan ketahanan lingkungan dan pengendalian dampak pembangunan	- Pengelolaan transportasi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan masih terbatas

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Peningkatan keselamatan jalan dan manajemen lalu lintas daerah	Mewujudkan Layanan Transportasi Daerah yang terhubung, berkeselamatan, dan berkelanjutan	Meningkatnya kualitas pelayanan dan keselamatan transportasi Kabupaten	- Penguatan layanan dasar transportasi publik	- Rehabilitasi & pemeliharaan terminal Tipe C
Penguatan sarana pendukung transportasi darat, terminal dan perparkiran Peningkatan pelayanan dan keterjangkauan angkutan umum dan perintis Modernisasi dan digitalisasi layanan uji kendaraan bermotor Optimalisasi pemanfaatan Bandara Warukin sebagai simpul konektivitas udara regional			- Modernisasi sistem layanan transportasi	- Pengembangan angkutan umum yang terjangkau & terintegrasi
			- Pengembangan infrastruktur dan sarana pendukung transportasi	- Penyediaan fasilitas keselamatan lalu lintas (rambu, marka, APILL)
			- Peningkatan kesadaran dan kepatuhan berlalu lintas	- Audit dan inspeksi keselamatan transportasi
			- Penerapan manajemen keselamatan berbasis data	- Penerapan manajemen keselamatan berbasis data

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

DINAS PERHUBUNGAN

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mewujudkan prioritas pembangunan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong telah ditetapkan program kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada perubahan tahun 2025 melalui 2 (dua) program 17 (tujuh belas) kegiatan dan 41 (Empat puluh satu) sub kegiatan, sebagai berikut :

No.	Program	Kegiatan		Sub Kegiatan	
1	Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten	1	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				2	Pelaksanaan pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
		2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
				5	Pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi
		4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	6	Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
				7	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
				8	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan
				9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
				11	Penyediaan jasa komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik
				12	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
				14	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
				15	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	7	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kotaa	16	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kotaa
				17	Penetapan kebijakan dan sosialisasi rencana dan sosialisasi Rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten/Kota

		8	Penyediaan Perlengkapan Jalan di jalan Kabupaten/Kota	18	Penyediaan Perlengkapan jalan Kabupaten/Kota
				19	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
		9	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe c	20	Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)
				21	Rehabilitasi dan pemeliharaan terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)
		10	Penerbitan izin penyelenggaraan dan pemabangunan fasilitas parkir	22	Fasilitas pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas farkir kewenangan kabupaten/kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik
				23	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan Kabupaten/Kota
		11	Penguji Berkala Kendaraan Bermotor	24	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penguji Berkala Kendaraan Bermotor
				25	Penyediaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor
		12	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	26	Pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)
				27	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)a
				28	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota
				29	Forum lalu lintas dan angkutan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota
				30	Pengadaaan dan pemasangan perlengkapan jalan dalam rangka Manajemen Rekayasa Lalu Lintas
		13	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu lintas (Andalalin) Untuk jalan Kabupaten/Kota	31	Koordinasi dan singkronisasi penilaian hasil Andalalin
				32	Peningkatan Kompetensi peneialian Andalalin
				33	Pengawasan pelaksanaan Rekomendasi persetujuan teknis Andalalin
		14	Audit dan inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	34	Pelaksanaan inspeksi, Audit dan pemantauan Terminal
				35	Pelaksanaan inspeksi, Audit dan pemantauan pemenuhan persyaratan penyelenggaraan kompetensi pengemudi kendaraan bermotor Kabupaten/Kota
				36	Pelaksanaan inspeksi, Audit dan Pemantauan sistem Manajemen Keselamatan Perushaaan Angkutan Umum
				37	Peningkatan kapasitas auditor dan inspektur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
		15	Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	38	Pengendaian dan Pengawasan Angkutan Umum Untuk jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota

				39	Penyediaan Angkutan Umum untuk jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota
		16	Penetapan Kawasan Perkoataan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	40	Perumusan kebijakan penetapan Kawasan perkotaan untuk angkutan perkotaan kewenangan Kabupaten/Kota
		17	Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan irang dalam trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1(satu) daerah kabupaten/kota	41	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Tahun 2025				Usulan Perubahan Tahun 2025			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu setelah pergeseran 1 (Rp)	Sumber Dana	Indikator	Target	Pagu (Rp)	Alasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar				49.131.191.621,00				50.351.888.421,00	
2.15	Bidang Perhubungan				49.131.191.621,00				50.351.888.421,00	
	Dinas Perhubungan				49.131.191.621,00				50.351.888.421,00	
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Nilai Kepuasan terhadap pelayanan kesekretariatan (%)	Kabupaten Tabalong	100%	20.236.114.172,00	APBD	Nilai Kepuasan terhadap pelayanan kesekretariatan (%)	100%	19.974.347.576,00	
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Tabalong	100%	277.108.000,00,00		Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	205.370.000,00	
2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	Kabupaten Tabalong	21 Laporan	223.312.000,00		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	21 Laporan	160.712.000,00	
2.15.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	Kabupaten Tabalong	3 Data	53.796.000,00		Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	3 Data	44.685.000,00	
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah yang tertib, transparan, dan akuntabel	Kabupaten Tabalong	100%	8.777.238.000,00		Terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah yang tertib, transparan, dan akuntabel	100%	8.777.238.000,00	
2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	Kabupaten Tabalong	14 Orang/Bulan	8.777.238.000,00		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	14 Orang/Bulan	8.777.238.000,00	
2.15.01.2.02	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian secara tertib, mutakhir dan	Kabupaten Tabalong	100%	645.894.000,00		Persentase Terlaksananya Administrasi	100%	1.038.870.000,00	

		terdokumentasi					Kepegawaian secara tertib, mutakhir dan terdokumentasi			
2.15.01.2.02.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	Kabupaten Tabalong	1 Paket	343.430.000,00		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1 Paket	343.430.000,00	
2.15.01.2.02.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	Kabupaten Tabalong	200 Orang	302.464.000,00		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	200 Orang	695.440.000,00	
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Umum perkantoran yang tertib dan efisien	Kabupaten Tabalong	100%	1.307.606.782,00		Persentase Terpenuhinya Administrasi Umum perkantoran yang tertib dan efisien	100%	1.413.247.083,00	
2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	Kabupaten Tabalong	22 Paket	28.108.782,00		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	22 Paket	25.873.645,00	
2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	Kabupaten Tabalong	91 Paket	792.708.952,00		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	91 Paket	1.026.425.086,00	
2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Kabupaten Tabalong	14 Paket	43.033.048,00		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	14 Paket	38.942.992,00	
2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Kabupaten Tabalong	170 Laporan	443.756.000,00		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	170 Laporan	322.005.360,00	
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Tabalong	100%	5.809.741.370,00		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	5.354.401.307,00	
2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	Kabupaten Tabalong	1 Laporan	22.500.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1 Laporan	26.500.000,00	
2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	Kabupaten Tabalong	1 Laporan	496.700.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1 Laporan	538.700.000,00	
2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Kabupaten Tabalong	12 Laporan	496.700.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan	4.789.201.370,00	

		Kantor yang Disediakan (Laporan)					Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)			
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah yang di pelihara oleh perangkat daerah	Kabupaten Tabalong	100%	3.418.526.020,00		Terpeliharanya Barang Milik Daerah yang di pelihara oleh perangkat daerah	100%	3.185.221.123,00	
2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	Kabupaten Tabalong	34 Unit	604.796.400,00		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	34 Unit	604.796.400,00	
2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	Kabupaten Tabalong	120 Unit	88.190.000,00		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	120 Unit	111.590.000,00	
2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Kabupaten Tabalong	1 Unit	2.725.539.620,00		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1 Unit	2.468.834.723,00	
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Konektivitas Darat (%)	Kabupaten Tabalong		28.895.077.449,00		Konektivitas Darat (%)		30.377.540.845,00	
		Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal (%)	Kabupaten Tabalong				Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal (%)			
		Persentase layanan jasa sarana dan prasaranan fasilitas keselamatan perhubunganI (%)	Kabupaten Tabalong				Persentase layanan jasa sarana dan prasaranan fasilitas keselamatan perhubunganI (%)			
2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah	Kabupaten Tabalong	3 Dokumen	330.401.000,00		Jumlah dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah	3 Dokumen	266.945.000,00	
2.15.02.2.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota (Dokumen	Kabupaten Tabalong	3 Dokumen	250.000.000,00		Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota (Dokumen	3 Dokumen	207.854.000,00	
2.15.02.2.01.0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan	Kabupaten Tabalong	1 Dokumen	80.401.000,00		Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan	1 Dokumen	58.091.000,00	

		Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota (Dokumen)		n			dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota (Dokumen)			
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah unit perlengkapan jalan yang terpasang pada ruas jalan kabupaten/kota	Kabupaten Tabalong	350 Unit	3.370.079.23,00		Jumlah unit perlengkapan jalan yang terpasang pada ruas jalan kabupaten/kota	350 Unit	4.059.690.668,00	
2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)	Kabupaten Tabalong	350 Unit	3.069.563.500,00		Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)	350 Unit	3.808.910.937,00	
2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit)	Kabupaten Tabalong	457 Unit	300.515.731,00		Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit)	457 Unit	250.779.731,00	
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang beroperasi sesuai standar pelayanan	Kabupaten Tabalong	3 Unit	9.146.709.818,78		Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang beroperasi sesuai standar pelayanan	3 Unit	8.388.341.738,00	
2.15.02.2.03.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun (Dokumen)	Kabupaten Tabalong		0,00		Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun (Dokumen)		0,00	
2.15.02.2.03.0007	Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang) (Unit)	Kabupaten Tabalong	1 Unit	4.905.711.556,90		Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang) (Unit)	1 Unit	3.494.111.705,00	
2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara (Unit)	Kabupaten Tabalong	2 Unit	4.240.998.261,88		Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara (Unit)	2 Unit	4.894.230.033,00	
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir yang diterbitkan	Kabupaten Tabalong	1 Dokumen	871.335.646,77		Jumlah izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir yang diterbitkan	1 Dokumen	250.340.713,00	
2.15.02.2.04.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan	Kabupaten Tabalong	1 Dokumen	774.841.961,00		Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam	1 Dokumen	171.312.300,00	

		Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)					Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)			
2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	Kabupaten Tabalong	36 Laporan	96.493.685,77		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	36 Laporan	76.028.413,00	
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan bermotor yang diuji secara berkala	Kabupaten Tabalong	4600 KBWU	727.800.000,00		Jumlah kendaraan bermotor yang diuji secara berkala	4600 KBWU	1.098.708.676,00	
2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara (Unit)	Kabupaten Tabalong	13 Unit	727.800.000,00		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia (Unit)	13 Unit	1.098.708.676,00	
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kabupaten Tabalong	100%			Terlaksananya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kabupaten Tabalong	100%	
2.15.02.2.06.0008	Pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)	Jumlah lokasi/ruas jalan yang dilaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas	Kabupaten Tabalong	4 Unit	1.498.728.000,00		Jumlah lokasi/ruas jalan yang dilaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas	4 Unit	1.498.728.000,00	
2.15.02.2.06.0013	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Jumlah kawasan pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah yang terbangun (Unit)	Kabupaten Tabalong	4 Unit	997.700.000,00		Jumlah kawasan pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah yang terbangun (Unit)	4 Unit	1.482.420.000,00	
2.15.02.2.06.0014	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kabupaten Tabalong	3 Dokumen	406.043.000,00		Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS) (Unit)	3 Dokumen	470.843.000,00	
2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)	Kabupaten Tabalong	3 Laporan	300.000.000,00		Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Dokumen)	3 Laporan	284.008.000,00	

2.15.02.2.06.0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah perlengkapan jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Kabupaten Tabalong	3 Dokumen	4.851.500.581,00		Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)	3 Dokumen	4.851.500.581,00	
2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya Hasil analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Kabupaten Tabalong	100%	262.958.000,00		Tersedianya Hasil analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	100%	327.958.000,00	
2.15.02.2.07.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin (Laporan)	Kabupaten Tabalong	1 Laporan	206.564.000,00		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin (Laporan)	1 Laporan	306.564.000,00	
2.15.02.2.07.0005	Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin	Jumlah penilai Andalalin yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi (Orang)	Kabupaten Tabalong	1 Orang	35.000.000,00		Jumlah penilai Andalalin yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi (Orang)	0 Orang	0.00	
2.15.02.2.07.0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi (Laporan)	Kabupaten Tabalong	1 Laporan	21.394.000,00		Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi (Laporan)	1 Laporan	21.394.000,00	
2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Terlaksananya permintaan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ yang terpenuhi	Kabupaten Tabalong	100%	1.079.537.000,00		Terlaksananya permintaan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ yang terpenuhi	100%	930.224.000,00	
2.15.02.2.08.0003	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal (Laporan)	Kabupaten Tabalong	3 Laporan	463.097.000,00		Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal (Laporan)	3 Laporan	465.307.000,00	
2.15.02.2.08.0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota (Laporan)	Kabupaten Tabalong	3 Laporan	300.000.000,00		Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota (Laporan)	3 Laporan	266.796.000,00	
2.15.02.2.08.0007	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (Laporan)	Kabupaten Tabalong	3 Laporan	281.440.000,00		Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan	3 Laporan	198.121.000,00	

							Perusahaan Angkutan Umum (Laporan)			
2.15.02.2.08.0008	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Jumlah Auditor dan Inspektur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	Kabupaten Tabalong	1 orang	35.000.000,00		Jumlah Auditor dan Inspektur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	1 orang	0.00	
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Tabalong	100%	4.704.250.171,45		Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	5.191.875.849,00	
2.15.02.2.08.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	Kabupaten Tabalong	4 Laporan	523.965.295,00		Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	4 Laporan	523.676.295,00	
2.15.02.2.08.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)	Kabupaten Tabalong	55 Unit	4.180.284.876,45		Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)	57 Unit	4.668.199.554,00	
2.15.02.2.10	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya usulan Kawasan perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Tabalong	100%	277.665.000,00		Terpenuhinya usulan Kawasan perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	242.551.500,00	
2.15.02.2.10.0001	Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kebijakan penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan kewenangan kabupaten/kota	Kabupaten Tabalong	1 Dokumen	277.665.000,00		Jumlah dokumen penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan lintas kabupaten/kota	1 Dokumen	242.551.500,00	
2.15.02.2.14	Penerbitan izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota	Terpenuhinya izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah	Kabupaten Tabalong	100%	70.370.000,00		Terpenuhinya izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam	100%	40.685.000,00	

		Kabupaten /Kota					1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota			
2.15.02.2.14.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	Kabupaten Tabalong	12 Laporan	70.370.000,00		Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	12 Laporan	40.685.000,00	
	UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor									
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		Kabupaten Tabalong		1.050.000.000,00				1.687.839.157,00	
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan bermotor yang diuji secara berkala	Kabupaten Tabalong	4600 KBWU	1.050.000.000,00		Jumlah kendaraan bermotor yang diuji secara berkala	4600 KBWU	1.687.839.157,00	
2.15.02.2.06.0013	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara (Unit)	Kabupaten Tabalong	13 Unit	1.050.000.000,00		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara (Unit)	13 Unit	1.687.839.157,00	
	UPTD Bandara Udara Warukin								4.155.220.000,00	
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Kepuasan terhadap pelayanan kesekretariatan (%)	Kabupaten Tabalong	100%			Nilai Kepuasan terhadap pelayanan kesekretariatan (%)	100%	4.155.220.000,00	
2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian secara tertib, mutakhir dan terdokumentasi	Kabupaten Tabalong				Terlaksananya Administrasi Kepegawaian secara tertib, mutakhir dan terdokumentasi	100%	595.608.000,00	
2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	Kabupaten Tabalong				Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1 Paket	85.210.000,00	
2.15.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	Kabupaten Tabalong				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	22 Orang	510.398.000,00	
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Umum perkantoran yang tertib dan efisien	Kabupaten Tabalong				Terpenuhinya Administrasi Umum perkantoran yang tertib dan efisien	100%	887.032.992,00	

2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	Kabupaten Tabalong				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1 Paket	577.864.243,00	
2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Kabupaten Tabalong				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1 Paket	12.652.749,00	
2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Kabupaten Tabalong				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	15 Laporan	296.516.000,00	
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Tabalong				Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	2.324.036.239,00	
2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	Kabupaten Tabalong				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	10 laporan	81.600.000,00	
2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Kabupaten Tabalong				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	10 laporan	22.42.436.239,00	
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah yang di pelihara oleh perangkat daerah	Kabupaten Tabalong				Terpeliharanya Barang Milik Daerah yang di pelihara oleh perangkat daerah	100%	348.542.769,00	
2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	Kabupaten Tabalong				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	4 Unit	45.780.000,00	
2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	Kabupaten Tabalong				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	6 Unit	11.690.000,00	
2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kabupaten Tabalong				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	291.072.769,00	
	TOTAL								56.194.947.578,00	

- Pagu induk 2025 : Rp. 50.181.191.621
- Pagu usulan perubahan 2025 Rp. 56.194.947.578

BAB IV

PENUTUP

Rencana kerja (Renja) Perubahan Dinas Perhubungan Daerah Tahun 2025 ini dilaksanakan dengan memperhatikan catatan-catatan, kaidah-kaidah serta rencana tindaklanjut pelaksanaan sebagai berikut:

1. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Tabalong 2025 diarahkan dan dikendalikan oleh Kepala Dinas Perhubungan, serta dilaksanakan oleh seluruh jajaran Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Tabalong sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya masing-masing.
2. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Tabalong 2025 merupakan Rencana Pembangunan Tahunan Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Tabalong yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Dinas Perhubungan Daerah (RKAP-PD) sebagai dokumen perencanaan program/kegiatan dan anggaran perubahan tahun 2025. Seluruh komponen dinas diwajibkan untuk menjabarkan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Tabalong 2025 kedalam Rencana Kerja dan Anggaran perubahan Unit/ satuan tugasnya masing-masing.
3. Sumber dana untuk menjalankan Perubahan Renja Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Tabalong 2025 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Kabupaten Tabalong.
4. Pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.
5. Pengawasan, Pengendalian, dan Evaluasi di tingkat pelaksanaan dilakukan secara berjenjang dan melekat mulai dari jajaran paling bawah sampai jajaran paling atas pada masing-masing unsur satuan unit kerja.
6. Fungsi Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi dikoordinasikan oleh Sekretariat Dinas Perhubungan Daerah.
7. Pengendalian dan Evaluasi Renja Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Tabalong 2025 dilakukan dengan tertib dan obyektif serta disampaikan dalam bentuk laporan tertulis secara periodik kepada Kepala Dinas Perhubungan yang terintegrasi dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Tabalong. Pada akhir tahun dilaksanakan evaluasi akhir pelaksanaan perubahan Renja Dinas

Perhubungan Daerah Kabupaten Tabalong 2025, yang merupakan evaluasi kinerja tahunan yang terintegrasi dengan Renstra Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Tabalong sekaligus sebagai pertimbangan dalam penyiapan Rencana Kerja tahun berikutnya.

8. Perubahan Renja Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Tabalong 2025 disusun berdasarkan sejumlah asumsi sesuai perkembangan situasi dan kondisi faktual.
9. Dokumen ini dapat dilakukan review dan perubahan mengikuti pola dan perkembangan yang terjadi berdasarkan isu-isu strategis global, nasional dan daerah setelah melalui hasil evaluasi dan kajian yang objektif.
10. Untuk melaksanakan program dan kegiatan yang tertuang dalam Perubahan Renja Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025, organisasi penyelenggara Renja dimaksud seperti tertuang dalam tabel berikut ini :

*Tabel 5.1.
Organisasi penyelenggara Renja*

No.	Pejabat Pelaksana	Kedudukan
1.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong	Penanggungjawab Program dan Kebijakan Strategis
2.	2.1 Sekretaris	Penanggungjawab Program Kegiatan dan Dana Indikatif
	2.2 Kepala Bidang Sarana dan Prasarana	
	2.3 Kepala Bidang Lalu Lintas dan Keselamatan	
	2.4 Kepala Bidang Angkutan dan Multimoda	
	2.5 Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor	
	2.6 Kepala UPTD Bandara Warukin	
3.	Para pemangku jabatan struktural Eselon III, IV dan PNS golongan III di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong	Penanggungjawab Pelaksanaan Program, Kegiatan dan sub kegiatan

Tanjung, Agustus 2025

**Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Tabalong,**



TIMBURLULIANMANALU,S.STP,MT

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19780508 199612 1 002